

**IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
(DINAS PKP) DI DESA SITIO II  
KECAMATAN LINTONGNIHUTA  
KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANITA FRANSISKA**

**188520108**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/9/22

**IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
(DINAS PKP) DI DESA SITIO II  
KECAMATAN LINTONGNIHUTA  
KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area

**OLEH:**

**ANITA FRANSISKA**

**188520108**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)14/9/22







## ABSTRAK

Program bedah rumah adalah program yang ditujukan Pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh bantuan rumah layak huni. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program bedah rumah yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinas PKP) di Desa Sitio II Kecamatan Humbang Hasundutan Sumatera Utara dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi program bedah rumah. Adapun teori yang digunakan adalah teori Implementasi dari Van Meter dan Van Horn yang memiliki enam indikator, yaitu Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program bedah rumah di Desa Sitio II Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan sudah terealisasi secara baik namun ada satu indikator yang belum dapat direalisasikan secara tepat yaitu sumber daya berupa dana. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi program bedah rumah ini yaitu, sumber daya berupa materi (dana) kurang memadai, data yang diberikan tidak sesuai dengan fakta langsung di lapangan, dan tidak dapat berpindah lokasi dari letak rumah sebelumnya.

Kata Kunci: Program, Bedah Rumah, Kesejahteraan Masyarakat

## ABSTRACT

*The house renovation program is a program aimed at the government for Low Income Communities (LIC) who have limited purchasing power so that they receive support from the government to obtain housing assistance. The purpose of this study was to describe the implementation of the house renovation program that had been carried out by the Department of Housing, Settlement and Land Affairs (DISPERKIM) in Sitio II Village, Humbang Hasundutan District, North Sumatra and to determine the inhibiting factors in the implementation of the house renovation program. is the implementation theory of Van Meter and Van Horn which has 6 indicators, namely standards and policy objectives or policy measyres and objectives, characteristics of the organization implementing communication between organizations, the disposition or attitude of the implementers and the socio-economic and political environment. The theory used The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research shows that the implementation of the house renovation program in Sitio II Village, Lintongnihuta District, Humbang Hasundutan Regency has been realized well but there is one indicator that has not been realized properly, namely resources in the form of funds. There are several inhibiting factors in the implementation of this house renovation program, namely, inadequate material resources (funds), the data provided is not in accordance with the facts directly in the field, and cannot move from the location of the previous house.*

*Keywords: Program, Home Surgery, PublicWelfare*

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Anita Fransiska, anak dari Hesekiel Silaban dan Reliwati Pasaribu. Lahir pada 19 November 2000 di Jakarta. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 10 Pagi Cengkareng Timur, Jakarta Barat, dan pindah pada kelas 5 SD ke Sekolah Dasar 173331 Sopobutar pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Lintongnihuta, kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Lintongnihuta. Pada tahun 2018 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Bedah Rumah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PKP) di Desa Sitio II Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah berpartisipasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Bapak Drs. Bahrum Jamil, M.AP selaku Dosen Pembimbing 1 saya yang selalu sabar dan sedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 saya yang telah memberikan arahan dan sedia meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi ini
5. Ibu Zoraya Alfathin Rangkuti, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris skripsi penulis

6. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ka. Prodi Administrasi Publik Universitas Medan Area
7. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
8. Terkhusus kepada kedua orangtua tercinta yang sudah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan senantiasa memberi dukungan, motivasi dan doa serta materi yang selalu diusahakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada adik saya Andryan Andreas yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
10. Pejuang Toga 2022 ( Apriska Ginting, Levis Mariana dan Via Maharani) yang senantiasa memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Terspesial untuk Apriska yang selalu memotivasi penulis dan sedia membantu dalam penulisan skripsi ini
11. Harrys Simon Nababan sebagai Laki-laki terkasih yang sangat setia menemani dan memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini
12. Keluarga lainnya yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada peneliti demi selesainya skripsi ini
13. Kepada Pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yaitu Ibu Else Ambarita, ST selaku Jabfung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.
14. Kepala Desa Sitio II yang berkenan mengantar penulis untuk bertemu langsung dengan Dinas Perkim sekaligus sebagai infoman penelitian

15. Sekretaris Desa Sitio II yang berkenan membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data dan dokumen terkait penelitian ini
16. Semua masyarakat yang telah membantu peneliti memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini
17. Seluruh teman-teman seperjuangan (Mahasiswa Administrasi Publik A2) yang selalu memberikan semangat dan doanya.

Penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini dimana skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan koreksi dan saran yang bersifat membangun sehingga dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya akan lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Medan, Maret 2022  
Penulis

Anita Fransiska

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	v
RIWAYAT HIDUP .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	5
1.3.Batasan Masalah .....	5
1.4.Tujuan Penelitian .....	6
1.5.Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Kebijakan Publik .....	8
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik .....	8
2.1.2. Unsur-Unsur Kebijakan Publik .....	8
2.1.3. Karakteristik Kebijakan Publik .....	10
2.2. Implementasi .....	10
2.2.1. Pengertian Implementasi .....	10
2.2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	11
2.2.3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan .....	12
2.2.4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan .....	13
2.3. Program Bedah Rumah .....	14
2.3.1. Kriteria Bedah Rumah .....	16
2.3.2. Persyaratan Penerima Bantuan .....	16
2.4. Penelitian Relevan .....	17
2.5. Kerangka Pemikiran .....	20
2.5.1. Teori Van Meter dan Van Horn .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>

3.1. Jenis Penelitian .....	26
3.2. Lokasi Penelitian .....	26
3.3. Waktu Penelitian .....	27
3.4. Informan Penelitian .....	27
3.5. Sumber Data .....	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6.1. Observasi .....	30
3.6.2. Wawancara .....	30
3.6.3. Dokumentasi.....	31
3.7. Teknik Analisis Data .....	31
3.7.1. Pengumpulan Data.....	31
3.7.2. Reduksi Data .....	32
3.7.3. Penyajian Data.....	33
3.7.4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi .....	33
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	34
4.1.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	34
4.1.2. Struktur Pemerintahan Desa Sitio II .....	35
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Sitio II.....	36
4.1.4. Visi Misi Desa Sitio II.....	40
4.2. Pembahasan .....	40
4.3. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program Bedah Rumah .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 2.5. Kerangka Berpikir .....	29
Tabel 3.3. Waktu Penelitian .....	31
Gambar 4.1.2. Struktur Pemerintahan Desa Sitio II .....	37
Tabel 4.2. Pembahasan Sumber Daya Manusia .....	41
Tabel 4.2. Pembahasan Sumber Daya Dana (Uang).....	42
Diagram 4.2. Pembahasan Struktur Organisasi Pelaksana.....	45



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pada umumnya, pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari suatu Negara demi terciptanya hidup yang sejahtera. Pembangunan pada umumnya merupakan tahap perubahan secara terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik. Menurut Siagian (2012: 13), pengertian pembangunan yaitu suatu rangkaian usaha perkembangan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara, dan pemerintah.

Dengan sistem pemerintahan yang baik bekerja dan transparan diharapkan dapat menghasilkan kepemimpinan daerah yang baik. Pemerintah memiliki tiga unsur yakni: a. Negara, pemerintahan, dan pemerintah daerah b. Sektor swasta atau dunia usaha c. Masyarakat. Dimana ketiga unsur tersebut saling berinteraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang kawasan dan permukiman masyarakat bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan kawasan permukiman agar warga negara dapat bertempat tinggal serta memiliki rumah yang layak huni dan terjangkau dalam rumah yang sehat dan aman. Dalam mewujudkan rumah yang layak huni dan didukung dengan prasarana dan sarana untuk menjadikan perumahan yang sehat dan aman perlu juga didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya. Rumah yang layak huni itu merupakan kondisi ideal dimana bangunan memiliki kecukupan dalam hal ruang luas ruangan dan memerlukan

kualitas material pembangunan seperti dinding, lantai, atap dan wilayah rumah yang nyaman.

Kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran pada program bedah rumah telah disediakan, program bedah rumah ini telah dilaksanakan di sejumlah dusun yang ada di Desa Sitio II Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Namun tidak banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan program bedah rumah tersebut. Kepala Dusun Desa Sitio II harus melakukan survei dimana akan menentukan rumah yang layak dibedah atau tidak dikarenakan adanya syarat-syarat tertentu untuk rumah milik masyarakat yang layak diperbaiki atau dibedah. Syarat-syaratnya bisa dilihat dari masyarakat yang merupakan masyarakat miskin dan memang kondisi rumah yang tidak layak lagi untuk dihuni.

Adapun masalah yang dipilih yaitu apa saja faktor penghambat dalam kegiatan program bedah rumah tersebut. Sebelum dilakukannya kegiatan bedah rumah tersebut, pemerintah sudah memperkirakan biaya yang dibutuhkan. Perkiraan biaya tersebut akan disesuaikan dengan anggaran yang akan dialokasikan. Jika rancangan biaya sudah terelokasikan dengan baik, maka kegiatan bedah rumah dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan program bedah rumah tersebut, penerima bantuan tidak dapat membangun rumah jika area atau daerah memiliki jarak yang jauh dari rumah yang menjadi sasaran program tersebut, maka dari hal itu, masyarakat merasa sangat diresahkan oleh persyaratan yang diciptakan oleh pemerintah. Rumah yang mendapatkan program pembangunan rumah baru tersebut harus memiliki jarak maksimal lima meter dari rumah yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan,

data yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, kurang mampunya masyarakat penerima program bedah rumah ini untuk berswadaya sebagai tambahan uang mereka.

Untuk menghindari kegagalan implementasi kebijakan bedah rumah tersebut, sangat ditekankan keefektifan dari tindakan yang dicapai oleh perancangan kebijakan yang disampaikan kepada agen pelaksanaan yang terlibat dalam melancarkan tujuan kebijakan.

Kriteria masyarakat untuk mendapatkan program bedah rumah adalah:

1. Warga negara Indonesia
2. Sudah berkeluarga
3. Memiliki atau menguasai tanah
4. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni
5. Belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah.

Dalam program bedah rumah di desa Sitio II ini terdapat turunan kebijakan atau undang-undang secara umum yang menjadi patokan dalam berjalannya program tersebut. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2018 tentang besaran nilai dan lokasi bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2018. Yang menimbang bahwa dengan adanya penyesuaian antara kebutuhan dari penerima bantuan dengan lokasi bantuan, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/KPTS/M/2018 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program bedah rumah yang ada di Desa Sitio II

Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ini sudah berjalan mulai tahun 2019 sampai saat ini.

Dapat dilihat langsung kenaikan masyarakat penerima program bedah rumah ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, masyarakat penerima program bedah rumah ini sebanyak 5 Kepala Keluarga, namun di tahun 2022 saat ini masyarakat penerima program bedah rumah ini naik menjadi 20 Kepala Keluarga. Hal ini timbul dikarenakan Kepala Desa maupun Kepala Dusun setiap dusun mengusulkan rumah masyarakatnya kepada pihak dinas. Kepala desa maupun Kepala dusun mengusulkannya dengan cara melihat rumah masyarakat yang masih berinding papan atau rumah panggung. Terkait target dari program bedah rumah ini tidak ditentukan beberapa banyak kepala keluarga yang berhak mendapatkan program ini, namun nantinya Kepala Dusun saja yang akan turun langsung ke rumah masyarakat untuk melihat rumah masing-masing keluarga. Apabila rumah tersebut layak untuk dibedah maka kepala dusun akan mengusulkannya ke Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa akan mengusulkannya kembali ke Pihak Dinas.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih fokus peneliitan bedah rumah dikarenakan peneliti melihat adanya berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program bedah rumah tersebut. Masalah yang timbul dalam program bedah rumah di lokasi tersebut adalah dimana masyarakat penerima bantuan program bedah rumah itu tidak dapat membangun atau merenovasi rumah mereka jauh dari lokasi rumah sebelumnya. Jarak paling jauh yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat hanya sejauh 5 meter dari rumah sebelumnya.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian itu karena peneliti mendapatkan masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap program bedah rumah itu dimana ketidakpuasan terkait biaya yang sangat minim dalam memenuhi bahan-bahan bangunan yang diperlukan dalam proses pembangunan rumah. Kebijakan-kebijakan pemerintah pastinya ada yang kurang dalam mencapai tujuan mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara efektif dan efisiensi sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat karena kesejahteraan masyarakat merupakan tingkat kelayakan hidup masyarakat.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana impelementasi program bedah rumah yang telah dilakukan Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Sitio II Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program bedah rumah di Desa Sitio II Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan?

### **1.3.Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka permasalahan tersebut perlu dibatasi supaya penelitian ini lebih terarah. Berpacu pada latar belakang dan rumusan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada

Implementasi Program Bedah Rumah Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat di Desa Sitio II Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Untuk menciptakan hasil yang maksimal dari penelitian terkait implementasi program bedah rumah di Desa Sitio II Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, terbentuklah tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program bedah rumah yang telah dilakukan Pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat
2. Untuk meninjau faktor penghambat dalam pelaksanaan program bedah rumah yang telah dilakukan Pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a) Hasil penelitian ini sebagai penambahan ilmu pengetahuan terhadap implementasi program bedah rumah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sitio II Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.
  - b) Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi program bedah rumah

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang program bedah rumah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### b) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan atau tambahan dari kebijakan yang terkait dengan implementasi program bedah rumah di Desa Sitio II Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kebijakan Publik

##### 2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan memiliki banyak makna. Menurut Hogwood dan Gunnyang dikutip dalam Parsons (2011:15) menyebutkan 10 pemakaian istilah kebijakan, yaitu sebagai tanda untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai *output*, sebagai hasil (*outcome*), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses.

Dari berbagai kepustakaan, dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik dalam *public policy*, yaitu sebuah peraturan yang menata kehidupan bersama yang wajib ditaati dan cara untuk membalut seluruh warganya. Aturan atau peraturan secara sederhana dapat dipahami sebagai kebijakan publik dan kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu hukum. Bukan hanya sekedar hukum, tetapi seluruh warga harus mengetahuinya secara benar dan menyeluruh.

##### 2.1.2. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2012), ada 4 unsur penting dalam kebijakan, yaitu:

###### 1. Tujuan Kebijakan

Suatu kebijakan dibuat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kebijakan yang baik tentu memiliki tujuan yang baik juga. Tujuan yang baik tersebut memiliki tiga ciri, yaitu pencapaian yang diharapkan, objektif atau realistis, dan dapat mengarah ke depan. Tujuan yang diharapkan berarti tujuan tersebut dapat

disetujui di kalangan masyarakat karena terdapat isi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh banyak pihak atau mewakili kepentingan mayoritas dalam masyarakat. Tujuan yang baik itu masuk akal, memiliki gambaran yang jelas, pola pikir yang luas, dan langkah-langkahnya mudah untuk dipahami. Tujuan yang baik mengarah ke depan, yang berarti tujuan kebijakan menghasilkan kemajuan kearah yang diinginkan dan dapat diukur baik dari aspek kuantitatif ataupun kualitatif.

## 2. Masalah

Masalah merupakan unsur penting dalam suatu kebijakan. Jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan, maka akan timbul kegagalan total dalam suatu kebijakan. Masalah memiliki dampak sangat luas bagi masyarakat dan mencakup dampak-dampak tertentu bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dengan masalah tersebut. Metode pemecahan masalah tidak ada artinya dijelaskan jika seorang analisis kebijakan gagal mengidentifikasi masalah yang ada. Dalam memecahkan masalah harus terdapat alternatif pemecahan masalah yang dijadikan sebagai kebijakan komprehensif berdasarkan sebab-sebab yang multidimensional.

## 3. Tuntutan (*Demand*)

Partisipasi merupakan ciri dari masyarakat maju. Dukungan, kritik, dan tuntutan merupakan bagian dari partisipasi. Tuntutan bisa terjadi karena dua hal, yaitu kebutuhan suatu golongan dalam proses perumusan masalah diabaikan, sehingga kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan akan dianggap merugikan kepentingan masyarakat tersebut, dan munculnya kebutuhan baru setelah suatu masalah selesai diatasi dan tujuan yang dituju telah tercapai.

#### 4. Dampak (*Outcomes*)

Dampak merupakan tujuan selanjutnya yang muncul sebagai dampak dari tercapainya suatu tujuan. Sesuai dari ciri kebijakan yang dapat bersifat positif dan negatif, dampak yang ditimbulkan juga dapat bersifat positif dan negatif.

##### 2.1.3. Karakteristik Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik akan menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson (dalam Abidin 2006:41) mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan publik, yaitu:

- 1 Kebijakan publik adalah perilaku yang bertujuan berorientasi pada tujuan daripada perilaku acak atau kebetulan.
- 2 Kebijakan publik terdiri dari rangkaian peraturan, bukan keputusan atau tindakan yang terpisah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
- 3 Kebijakan disebut sebagai sesuatu hal yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan segera dilakukan.
- 4 Suatu kebijakan dapat bersifat larangan atau dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan suatu kebijakan.
- 5 Dimana suatu kebijakan didasarkan pada hukum, karena memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi.

## 2.2. Implementasi

### 2.2.1. Pengertian Implementasi

Menurut Wahab (2014:117) Implementasi adalah proses umum dari tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkat program tertentu. Proses

pelaksanaan akan dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program telah disusun dan dana siap untuk dicairkan untuk mencapai sasaran.

Jenkins (dalam Parsons 2009:463) mengatakan bahwa kajian kebijakan yang mengarah pada proses implementasi suatu kebijakan setelah kebijakan dirumuskan dan disetujui kemudian akan mengimplementasikan cara-cara untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai.

Menurut Mazmanian (2014:84) mengemukakan bahwa implementasi adalah pemahaman yang jelas dimana suatu program dinyatakan sebagai aktor atau menjadi fokus perhatian kebijakan yang telah dirumuskan, yaitu fenomena yang muncul setelah disahkannya instruksi kebijakan, yang meliputi upaya administratif serta menimbulkan akibat atau dampak nyata bagi masyarakat.

Dari beberapa pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan Pemerintah untuk melakukan suatu kebijakan dalam satu aspek proses untuk menentukan hasil dari kebijakan tersebut.

### **2.2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan langkah dari proses kebijakan setelah berlakunya undang-undang. Sama dengan dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:145), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang telah mengesahkan program, kebijakan dan manfaat nyata.

Hill dan hupe (2014: 231) mengetahui implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dan hasil. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu perumus dan pelaksana. Beda halnya dengan Warwick

(dalam (dalam Agus Purwanto dan Sulistyastuti 2012) yang menyebutkan implementasi kebijakan sebagaimana transaksi sumber daya. Untuk menjalankan program, implementor harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok tertentu.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan mengimplementasikan kebijakan yang ditujukan kepada kelompok sasaran untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

### **2.2.3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan jika dilihat dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan yang bermanfaat untuk meraih tujuan dan dampak yang diinginkan (Winarno, 2014:102).

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Winarno (2002: 126-151), faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan antara lain:

#### **1) Komunikasi**

Tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan yakni, transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Faktor pertama adalah transmisi, dimana seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua, konsistensi yaitu implementasi kebijakan harus berlangsung secara efektif jika disertai dengan perintah-perintah pelaksanaan yang konsisten dan jelas. Faktor ketiga adalah kejelasan dimana

petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya diketahui oleh para pelaksana tetapi komunitas juga harus jelas.

2) Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang cukup serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas, wewenang dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan atau tingkah laku

Banyak kecenderungan dari para pelaksana memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Adanya dukungan yang baik, maka para pelaksana akan bersikap baik terhadap suatu kebijakan dan akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan.

4) Struktur birokrasi

Birokrasi adalah salah satu lembaga yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan, baik dari struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

#### 2.2.4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Senggono (2016:149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1) Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan dapat gagal karena belum jelasnya isi kebijakan, artinya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari

kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diterapkan menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berpengaruh. Keempat, kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang bersangkutan dengan waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.

2) Informasi

Adanya gangguan komunikasi yang dapat menghambat informasi terhadap pemegang peran kebijakan. Dimana kita tahu bahwa informasi sangat penting dalam mengansumsikan secara langsung informasi yang sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.

3) Dukungan

Dukungan adalah salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan publik akan sangat sulit apabila pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian Potensi

Aspek pembagian potensi dapat menjadi pemicu gagalnya implementasi kebijakan yang berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Terjadinya masalah dalam struktur organisasi pelaksanaan kebijakan disebabkan oleh pembagian wewenang dan tanggung jawab yang kurang disesuaikan dengan pembagian tugas dan ditandai oleh adanya pembatasan yang kurang jelas.

### 2.3. Program Bedah Rumah

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan derajat, harga diri, kualitas kehidupan dan penghidupan, serta

sebagai gambar diri pribadi dalam meningkatkan taraf hidup serta pembentukan watak dan kepribadian bangsa. Contoh paling nyata yang dapat dilihat dari masyarakat miskin bukan hanya sekedar dari minimnya pendidikan atau kesehatan, melainkan dari kualitas rumah dan tempat tinggal. Memiliki rumah layak huni adalah keinginan dari semua warga negara yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun aturan Perundang-undangan lainnya. Dalam UUD1945 Pasal 28 H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang nyaman yang terlindung dari sinar matahari, hujan, dan debu. Namun, karena ketergantungan ekonomi tidak semua orang terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu membangun rumah yang layak huni. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini bertujuan untuk memnberdayakan MBR agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumahnya secara mandiri sehingga dapat tinggal di rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan nyaman. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2011, renovasi rumah atau yang disebut dengan Perumahan Swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan usaha masyarakat, baik secara perorangan maupun sekelompok, yang meliputi renovasi, pemugaran/perluasan atau pengembangan rumah baru beserta lingkungan.

Program bedah rumah adalah program yang ditujukan kepada pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki daya beli

terbatas sehingga mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh bantuan perumahan layak huni. Kecukupan kualitas, dan kesehatan kawasan yang harus dipenuhi oleh suatu bangunan rumah merupakan standar layak huni.

Program bedah rumah yang dirancang pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentunya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, karena dengan adanya rumah yang nyaman dan sehat, keluarga miskin akan berkurang kerentanannya terhadap penyakit.

### **2.3.1. Kriteria Bedah Rumah**

- 1 Warga Negara Indonesia
- 2 MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap
- 3 Sudah berkeluarga
- 4 Memiliki atau menguasai tanah
- 5 Belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni
- 6 Menghuni rumah yang akan diperbaiki
- 7 Belum pernah mendapatkan bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat
- 8 Bersungguh-sungguh mengikuti Program Bantuan Stimulan dan Pemberdayaan Perumahan Swadaya

### **2.3.2. Persyaratan Penerima Bantuan**

Persyaratan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya adalah:

- 1 Surat permohonan dari MBR
- 2 Surat pernyataan yang berisikan:
  - a) Pertama kali menerima bantuan stimulan Pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah dari Kementerian Perumahan Rakyat

- b) Tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi
- c) Belum memiliki rumah untuk pembangunan rumah baru atau satu-satunya yang dimiliki untuk peningkatan kualitas rumah
- d) Akan menghuni rumah yang mendapatkan stimulan pembangunan rumah baru
- e) Fotocopy sertifikat hak atas tanah, fotocopy surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari Kepala Desa/Dusun
- f) Fotocopy kartu keluarga dan fotocopy kartu tanda penduduk
- g) Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang memiliki penghasilan tetap atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.

#### 2.4. Penelitian Relevan

Untuk mendukung penelitian yang integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih terdahulu mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti.

- 1 Aidin Sutrisno (2014) dengan judul Problematika Program Bedah Rumah Bagi Masyarakat Penerima Bantuan. Dalam penelitian ini ditemukan masalah dalam pelaksanaan program bedah rumah dimana masyarakat penerima bantuan tersebut merasa terbebani akibat banyaknya persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah, terjadinya miss komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, dan persyaratan penerima bantuan yang tidak

sesuai dengan kriteria yang menimbulkan kecemburuan sosial dimasyarakat. Dapat disimpulkan bahwa program bedah rumah masih belum optimal dilaksanakan karena masih banyak permasalahan.

Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan Aidin Sutrisno berfokus pada problematika atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam program bedah rumah, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada implementasi program bedah rumah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Simson Tondo (2017) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Bedah Rumah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program bedah rumah tidak sesuai dengan tujuan program dan harapan dari program itu sendiri. Ketidaksesuaian tujuan program dan harapannya dapat dilihat dari kurangnya komunikasi atau sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang program bedah rumah, tenaga kerja yang digunakan untuk pekerjaan membuat rumah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tentunya tidak memiliki keahlian dalam mengerjakan atau membuat rumah, dan pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab dalam hal kejujuran dan demokratis, dimana dalam pelaksanaan program di lapangan masih ada pekerjaan yang tidak tepat pada sasaran program dan terjadi ketidakadilan dalam menentukan keluarga sasaran.

Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan Simson Tondo berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui program bedah rumah sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada implementasi program bedah rumah itu dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian sebelumnya ini dapat dikatakan sama dengan penelitian yang akan saya lakukan karena pengentasan kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Pengentasan kemiskinan ini juga dilakukan dengan program bedah rumah

- 3 Livander Cormelius Likuayang, Gustaf Buddy Tampi, Rully Mambo (2019) dengan judul Efektivitas Program Bedah Rumah. Menyimpulkan bahwa program renovasi rumah tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan hubungan atau koordinasi antara undang-undang lama dengan BPD masih kurang baik dan adanya miss komunikasi antara kedua pihak yang membuat program bedah rumah tersebut.

Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan Livander Cornelius, dan kawan-kawan berfokus pada konsep efektivitas program bedah rumah, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada implementasi kebijakan program bedah rumah. Persamaannya dapat dilihat dari program bedah rumah ini dilakukan dengan upaya mensejahterakan masyarakat daerah.

- 4 Rezky Amaliah, Muhammad Rusli, Sarmadan (2020) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Bedah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Penerima Bantuan. Dalam penelitian ini, efektivitas pelaksanaan program bedah rumah sudah dapat dikatakan efektif dan sangat membantu bagi masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bedah rumah dalam penelitian ini berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan atau penyimpangan antarapa pemerintah dengan masyarakat yang bersangkutan.

Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Resky Amaliah, dan kawan-kawan bertujuan untuk mengetahui pengaruh program bedah rumah terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Tombekuku Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program bedah rumah di Desa Sitio II Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Persamaannya adalah meneliti implementasi program bedah rumah yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

5. Supardi (2012) dengan judul Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan program bedah rumah sebagian masih tidak tepat sasaran baik dinilai dari segi ekonomi, umur, pendapatan yang ditinjau berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk penerima bantuan bedah rumah serta adanya penyimpangan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) tingkat desa. Adapun terkait dengan biaya pembangunan bedah rumah banyak dipotong oleh tim pelaksana kegiatan tingkat desa dalam proses pembelian bahan bangunan yang mengakibatkan pembangunan tidak tepat dengan standar yang diharapkan.

Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan Supardi berfokus pada pengawasan pelaksanaan program bedah rumah masyarakat miskin, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan mengenai implementasi kebijakan program bedah rumah dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

## 2.5. Kerangka Pemikiran

### 2.5.1. Teori Van Meter dan Van Horn

Van Meter and Van Horn (2002: 100), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang digunakan oleh individu atau kelompok pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adanya 6 model dasar yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja. Dalam model ini, variabel yang terikat adalah kinerja yang didefinisikan sebagai sejauh mana standar dan tujuan kebijakan yang direalisasikan.

#### 1 Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan diukur dari tingkat keberhasilannya dan juga ukuran dan tujuan kebijakan yang sifatnya realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam buku Subarsono (2011) mengemukakan bahwa untuk mengatur kinerja implementasi kebijakan tentunya menggunakan standar dan target sasaran tertentu yang wajib untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian dalam standar dan sasaran tertentu. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan sikap terhadap para pelaksana. Arah sikap (disposisi) para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan suatu hal yang penting.

Dalam hal standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan ini nanti akan berisikan tentang kemana arah dan tujuan pelaksanaan program bedah

rumah ini. Sasarannya tentunya untuk membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera dan berubah dari kehidupan sebelumnya.

## 2 Sumber daya

Sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh kebijakan merupakan hal yang wajib dalam setiap tahap implementasi. Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia terutama sumber daya manusia.

Dalam hal sumber daya ini yang dimaksudkan adalah manusia/masyarakat yang berperan serta dalam pelaksanaan program bedah rumah tersebut. Sumber daya manusia ini seperti masyarakat penerima bantuan program bedah rumah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah.

## 3 Karakteristik organisasi pelaksana

Menjadi pusat perhatian lembaga pelaksana, yaitu sebagai organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat dan cocok.

Karakteristik organisasi pelaksana ini dimaksudkan dengan para pelaksana program dengan memiliki ciri yang sangat tepat dan cocok dalam kinerja implementasi kebijakan.

- 4 Komunikasi antar organisasi terkait dan suatu kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- Menurut Van Meter dan Van Horn (2002) agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efisien maka standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang akan bertanggung jawab atas pencapaian suatu standard dan tujuan kebijakan, karena itu standard dan tujuan harus diinformasikan pada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana dalam kebijakan tentang apa yang menjadi standard dan tujuan yang harus konsisten dan sama dari berbagai sumber informasi.

Yang dimaksud dengan komunikasi antar organisasi ini adalah hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Apakah komunikasi diantara pemerintah dengan masyarakat tersebut sudah berjalan dengan lancar sehingga dapat terjalannya program tersebut dengan lancar tanpa halangan.

- 5 Disposisi atau sikap para pelaksana
- Menurut Van Meter dan Van Horn (2002) ,keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik merupakan pengaruh dari sikap penerimaan atau pendekatan dari agen pelaksana kebijakan. Maksud dan tujuan umum dari suatu standar dan sasaran kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang sukses dapat gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan.

Sikap para pelaksana ini sangat penting dalam implementasi kebijakan dimana para pelaksana ini yang akan menentukan dan mengatur jalannya program.

Jika sikap para pelaksana sangat menyepelekan kebijakan tersebut maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

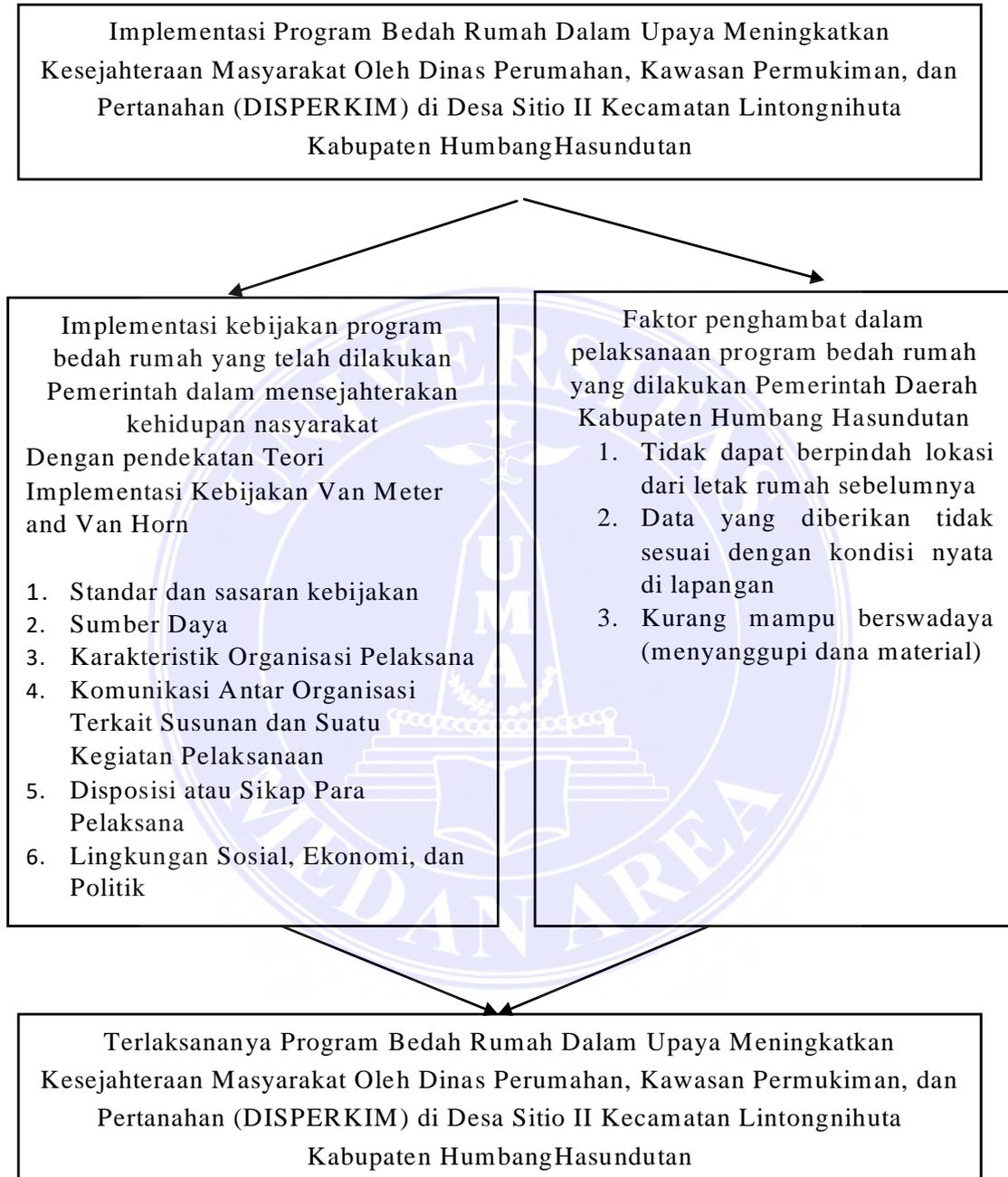
## 6 Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dengan tujuan mengevaluasi kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi ini dapat juga menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung terjadinya kebijakan. Jika dilihat dari segi lingkungan ekonomi apabila dalam pelaksanaan kebijakan program ini terjadi kekurangan dana maka program tersebut akan terhambat dan lama akan diselesaikan.

Dalam penelitian ini, tentu saja terdapat masalah dalam pelaksanaan program bedah rumah. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian secara mendalam terkait masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program tersebut. Dimana peneliti melakukan wawancara atau observasi langsung kepada informan untuk mendapatkan data di lapangan untuk menjawab dari tujuan penelitian menggunakan teori Van Meter and Van Horn (2002). Penelitian ini juga mendapatkan faktor-faktor penghambat dalam implementasi program bedah rumah. Setelah mendapatkan hasil di lapangan, maka harapan dari penelitian adalah supaya pihak dinas lebih memperhatikan aturan terkait jarak yang ditentukan dalam pembangunan rumah serta menimbang kembali dana yang akan disalurkan pihak dinas kepada masyarakat. Terlaksananya Program Bedah Rumah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Oleh Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DISPERKIM) di Desa Sitio II Kecamatan  
Lintongnihuta Kabupaten HumbangHasundutan



Gambar 2.5. Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sudarwan (2003: 52) penelitian deskriptif mengungkapkan bahwa dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat suatu keadaan atau wilayah populasi tertentu yang bersifat faktual. Alasan memilih teknik ini karena data yang diambil mampu memberikan data yang memuaskan. Jadi ketika dari satu sumber datanya masih kurang lengkap, peneliti bisa mengambil data dari informan yang lain.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, nantinya peneliti dapat mendapatkan informasi-informasi atau data-data yang tepat terkait tujuan penelitian ini. Dimana peneliti akan mendeskripsikan upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi kegagalan atau kendala dalam proses program tersebut dilaksanakan, peneliti juga akan mendeskripsikan faktor penghambat selama program tersebut dilaksanakan.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Sitio II Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena di tempat tersebut terdapat pola interaksi yang menarik, yakni dimana program bedah rumah tersebut dilaksanakan menimbulkan masalah bagi para warga yang mendapat bantuan program tersebut.

### 3.3. Waktu Penelitian

Tabel 3.3. Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	Bulan										
		Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Ags 2022
1	Pengajuan Judul	■										
2	Penyusunan Proposal	■	■									
3	Perizinan Sempro		■									
4	Pelaksanaan Sempro			■								
5	Pelaksanaan Penelitian				■	■	■	■				
6	Pengolahan Data					■	■	■				
7	Penyusunan Skripsi dan Perbaikan skripsi						■	■	■			
8	Seminar Hasil									■		
9	Sidang Meja Hijau											■

### 3.4. Informan Penelitian

Informan adalah anggota kelompok partisipan yang bertindak sebagai pengarah dan penafsir muatan budaya atau aktor yang terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung (Sugiyono, 2016: 300). Yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan kunci merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak terbatas pada wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat maupun akademisi (Sugiyono, 2019: 25). Informan kuncinya adalah pelaksana kebijakan yaitu pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan yaitu Ibu Else Ambarita, ST selaku Jabfung Teknik tata Bangunan dan Perumahan.

2. Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail masalah penelitian yang akan diteliti (Sugiyono, 2019: 25). Informan utama yaitu Kepala Desa Bapak Bongot Silaban dan Sekretaris Desa Bapak Herbin Silaban,
3. Informan tambahan yaitu orang-orang yang ditentukan di daerah penelitian yang diduga mampu memberikan informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2019:25). Informan Tambahan yaitu Masyarakat penerima bantuan yang terdapat lima keluarga di antaranya Lasmalum Sihite, Marune Hutasoit, Managam Silaban, Jannes Silaban, dan Selamat Sihite

### 3.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah subjek darimana data itu ditemukan (Arikunto, 2013:172). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan literatur lainnya (Moleong, 2005:157). Peneliti menggunakan dua sumber data dalam memperoleh dan mengumpulkan sumber data dalam penelitian ini antara lain:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012: 139). Peneliti mencari dan menemukan data kepada informan melalui wawancara atau pengamatan langsung ke lapangan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti nantinya akan bisamenjawab beberapa pertanyaan dari tujuan penelitian. Hasil wawancara inilah yang akan disesuaikan oleh peneliti terkait tujuan penelitian. Dimana dari data-data yang diperoleh akan menunjukkan adanya upaya-upaya Pemerintah dalam mengatasi kegagalan/kendala dalam pelaksanaan program bedah rumah tersebut, menunjukkan adanya implementasi kebijakan pemerintah dalam program bedah rumah.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat melalui cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2012: 141). Sumber data dalam penelitian ini tidak hanya berupa kata-kata, bahasa, dan tindakan dari informasi tetapi melalui studi pustaka dengan menggunakan buku dan media internet untuk mendukung analisis dan pembahasan. Selain itu juga akan mengambil data dari arsip dan foto dalam penelitian langsung.

Dari sumber data sekunder ini, dimana peneliti dapat menemukan persamaan/perbedaan dari setiap jurnal yang ditemukan. Dari jurnal itulah akan dikembangkan peneliti dalam menentukan tujuan penelitian. Jurnal, buku, ataupun dokumen-dokumen ini pastinya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kegagalan-kegagalan yang terjadi selama program dilaksanakan.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

#### 3.6.1. Observasi

Menurut Sukmadinata (2011: 220) menyatakan bahwa observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung.

Dalam observasi ini, peneliti akan meninjau secara langsung ke lapangan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program bedah rumah tersebut, untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terkait program bedah rumah, dan untuk meninjau upaya pemerintah dalam mengatasi kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan program bedah rumah tersebut.

#### 3.6.2. Wawancara

Menurut Nazir (2014: 170-171) menyatakan bahwa wawancara ialah proses memperoleh bukti untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Dengan demikian, peneliti akan membuat pedoman wawancara yang kemudian hasil wawancara dicatat segera. Setelah selesai melakukan wawancara agar tidak lupa. Wawancara akan dilakukan secara terbuka dan tidak berstruktur artinya wawancara dapat dilihat dan didengar oleh siapapun dan bentuk wawancara tidak berstruktur yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka dan bebas menjawab pertanyaan. Dalam melakukan wawancara, peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan terkait pelaksanaan program bedah rumah yang telah dilakukan dan pastinya ada faktor-faktor yang menjadi penghambat

dalam pelaksanaannya dan pastinya juga ada upaya pemerintah setempat dalam menangani faktor tersebut.

### **3.6.3. Dokumentasi**

Menurut Riyanto (2012: 103) metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan cara merekam data yang ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. Sugiyono (2015: 150) dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi ini dimana peneliti akan melakukan pengambilan data dengan cara mengambil foto ataupun gambar untuk membedakan rumah yang sebelum dibedah dan sesudah supaya dapat memastikan bahwa rumah tersebut nyata dilakukan program bedah rumah tersebut.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah tahap menemukan dan menyusun secara berurutan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan, dalam Sugiyono, 2016: 88).

#### **3.7.1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi dan kemudian menuliskannya dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, gambar dan sebagainya (Miles dan Huberman, 1992: 15-21). Dalam pengumpulan data ini

dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pengumpulan data adalah mencari untuk mencatat dan mengumpulkan segala sesuatunya secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan (Sugiyono, 2010: 338). Sama seperti teknik pengumpulan data yang telah dituliskan diatas, maka yang akan dilakukan dalam pengumpulan data ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

### **3.7.2. Reduksi Data**

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang muncul dari catatan penelitian (Miles dan Huberman, 2014: 16). Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data dilakukan. Pada pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan membuat catatan kaki. Pada intinya reduksi data terjadi sampai penulisan laporan akhir penelitian.

Dalam reduksi data, yang akan dilakukan peneliti adalah membuat ringkasan dari hasil wawancara dimana peneliti akan mendapatkan beberapa pendapat dari masyarakat yang menerima bantuan program bedah rumah dan menguraikannya. Dari pendapat yang diperoleh peneliti tentunya tentang upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi kegagalan atau masalah-masalah yang terjadi selama pelaksanaan program bedah rumah dijalankan. Pendapat lain dari

masyarakat juga pastinya tentang adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.

### **3.7.3. Penyajian Data**

Menurut Miles dan Huberman (2014: 84) penyajian data dimaksudkan untuk menemukan model yang bermakna dan memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan memberikan tindakan. Dalam teknik analisis penyajian data ini dilakukan dalam penelitian yang akan saya lakukan nanti dapat dilakukan dengan penemuan pola-pola yang timbul dalam faktor penghambat pelaksanaan program bedah rumah dan dapat menemukan bentuk-bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi kegagalan-kegagalan yang terjadi selama program bedah rumah itu dilaksanakan.

### **3.7.4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Jika tidak ditemukan bukti-bukti yang nyata dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka simpulan yang sudah dikemukakan bersifat sementara dan tentunya akan berubah. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid. Kesimpulan yang dibuat harus berkaitan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang telah diperjelas dan dibahas. Penarikan simpulan pada penelitian ini dapat diperoleh dari bukti-bukti nyata yang berkaitan dengan implementasi program bedah rumah. Bukti-bukti ini juga nanti akan dikembangkan menjadi kesimpulan yang memuat faktor penghambat terjadinya program bedah rumah serta upaya pemerintah dalam mengatasi kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan program bedah rumah tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Implementasi Program Bedah Rumah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dari keenam indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, lima indikator yang sudah terealisasi secara baik yaitu Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik namun ada satu indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu indikator sumber daya yang berupa dana atau uang
- b. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi program bedah rumah. Dalam pelaksanaan program bedah rumah terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat. Pertama, adanya peraturan dari pihak pusat dimana dalam membangun rumah tidak dapat jauh dari lokasi rumah sebelumnya. Jarak antara rumah sebelumnya ke rumah yang akan dibangun harus maksimal sejauh 5 meter. Kedua, data yang diberikan oleh pihak desa tidak sesuai oleh keadaan dan kondisi nyata di lapangan. Ketiga, kurang mampunya masyarakat dalam berswadaya untuk menambah dana yang telah diberikan oleh pihak dinas. Dengan adanya hambatan ini, mengakibatkan pelaksanaan program bedah rumah ini berjalan dengan lambat dan tidak efektif.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Sitio II untuk memberikan data yang sebenarnya. Supaya program bedah rumah dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pengulangan pemeriksaan data masyarakat yang bersangkutan. Jika data yang diberikan tidak benar maka program bedah rumah ini akan berjalan dengan lambat.
2. Besarnya dana yang menjadi alasan tersendiri bagi masyarakat penerima bantuan program ini. Jadi pemerintah pusat supaya lebih mempertimbangkan jumlah dana yang akan disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan program bedah rumah atau dengan kata lain supaya Pemerintah memberikan jalan keluar kepada masyarakat penerima program agar mereka dapat mencukupi dana dalam perihal bahan-bahan material bangunan.
3. Untuk lebih memperhatikan syarat dan peraturan terkait jarak antara rumah masyarakat yang sebelumnya ke lokasi rumah yang akan dibangun.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abidin,Said Zainal, (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah

\_\_\_\_\_, (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas

\_\_\_\_\_, (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humarika

AG. Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Agustinus, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Anggara, Sahya, (2014). *Kebijakan Publik: Pustaka Setia*, Bandung

Arikunto, Suharsimi,(2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

Jakarta: PT Rineka Cipta

D.S. Van Meter dan C.E. Van Horn, (1995). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Ohio: State University

-----, (2002). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Ohio: State University

-----, (2006), *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Ohio: State University

Fauzi, Ahkmad. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Guba, & Lincoln, (1998), *Handbook of Qualitative Research, Competing Paradigm in Qualitative Research*. Thousands Oaks: London, Sage

Gunn, Hogwood, (2005), *Policy Analysis*, British Journal of Political Science

Guntur, Muhammad, (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit UNM

Handoyo, Eko, (2012). *Kebijakan Publik: Widya Karya*, Semarang

Hardani, dkk, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif: Pustaka Ilmu*, Yogyakarta

Hill, Michael, &Hupe, Peter. (2014). *Implementing Public Policy: An Introduction To The Study Of Operational Governance*. Sage, 2014

- Jenkins, (2009), *Policy Analysis*, Oxford: Martin Robertson
- Moleong, Lexy, J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda
- Mazmanian, & Sabatier (2014), *Analisis Kebijakan Publik*, New York: HarperCollins
- (2006), *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Ohio: State University
- Miles, and Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moleong, Lexy, J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda
- Muhadjir, Noeng. (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nazir, Moh. (2009), *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia
- (2014), *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Parsons, (1995), *Public Policy*. Cheltenham: Edward Elgar
- , (2005), *Public Policy*. Jakarta: Kencana
- , (2011), *Public Policy*. Jakarta: Kencana
- Purwanto, Erwan Agus, Sulistyastuti, & Dyah Ratih. (2012), *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gawa Media
- Riyanto, (2012), *Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Penerbit SIC
- Siagian, Sondang, (2012), *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Sudarwan, (2003), *Riset Keperawatan Sejarah & Metodologi*. Jakarta: EGC
- Sugiyono, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- , (2012), *Pengertian Sumber Data Primer dan Sekunder*. Bandung: Alfabeta
- , (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*: Alfabeta, Bandung

- \_\_\_\_\_, (2015), *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_, (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Sukmadinata, (2011), *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Senggono, Bambang, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahab, Solichin, (1991), *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_, (2014), *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bina Aksara
- Widodo. (2015). *Pengukuran Kerja*. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada
- Winarno, (2002), *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- \_\_\_\_\_, (2007), *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- \_\_\_\_\_, (2014). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

### Skripsi

- Monica, Devi, (2019). *Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah Menurut Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2016 (Studi Kasus di Disa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi)*, Universitas Islam Negeri Sultahn Thaha Saifuddin Jambi
- Pasaribu, Lusya Juni, (2010), *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)*, Universitas Sumatera Utara

Amaliah Rezky, Rusli Muhammad, Sarmadan, (2020), *Efektivitas Pelaksanaan Program Bedah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Penerima Bantuan*, Universitas Halu Oleo

Sari, Maya Dea, (2019), *Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah (Studi Kasus Kecamatan Kotabumi Selatan)*, Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung

Supardi, (2016), *Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin di Desa Semelengi Besar*, UNILA

Sutrisno, Aidin, (2014), *Problematika Program Bedah Rumah Bagi Masyarakat Penerima Bantuan (Studi Kasus pada Penerima Program Bedah Rumah di Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu*

Tondo, Simson, (2017), *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Bedah Rumah (Studi Kasus di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara*, Universitas Halmahera

Widyastuti, Aini Nur, (2018), *Implementasi Program Bedah Rumah Dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Mojokerto*, Universitas Brawijaya

### **Jurnal**

Akib, Haedar, (2010). *Implementasi Kebijakan: Pengertian Implementasi*, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, 1(1), (1-11)

Likuayang, Livander Cornelius, tampi, Gustaf Buddy, dan Mambo Rully, (2019). *Efektivitas Program Bedah Rumah*. Jurnal Administrasi Publik, 5(82), (1-7)

TheJournalish: Social and Goverment, (2020). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, 1(1) ,(34-38)

### **Perundang-undangan**

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2018 tentang Besaran Nilai Dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018

Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintaha Desa

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2011

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1



## LAMPIRAN

Pertanyaan kepada Informan Inti: Pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,  
dan Pertanahan

No	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Ibu Else Ambarita, ST	Bagaimana kinerja kepala desa dalam mengurus seluruh data/dokumen masyarakat terkait dalam program bedah rumah ini?	Dari cara kerja kepala desa yang saya lihat sudah baik. Saya melihatnya dari cara beliau dalam mengatur dan melaksanakan tugas beliau dalam pelaksanaan program bedah rumah ini.
		Apakah sudah ditentukan jangka waktu pelaksanaan pembangunan rumah ini?	Dalam pelaksanaan program bedah rumah ini ditentukan jangka waktunya selama 2 bulan
		Apa saja yang menjadi kriteria masyarakat untuk dapat menerima program bedah rumah ini?	Kalau kriterianya itu tentu saja Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan penghasilan tetap atau tidak tetap, memiliki tanah, belum memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni, dan mrnghuni rumah yang akan dibedah.

		Adakah keluhan dari masyarakat terkait program ini? Apakah keluhannya?	Keluhan dari masyarakat pastinya ada. Keluhannya itu seperti, kenapa keluarga mereka tidak mendapatkan program ini padahal rumah mereka layak untuk dibedah. Kalau masalah ini kami tidak bisa berkutip apa-apa karena keoala desa mereka yang mengusulkan ke pihak dinas. Kami hanya melanjutkannya kepada atasan kami
		Apa tugas dan tanggungjawab saudara dalam pelaksanaan program ini?	Tugas kami tidak banyak sebenarnya. Kami hanya melakukan apa yang menjadi tugas kami. Seperti menerima data-data masyarakat dari pihak desa yang selanjutnya akan kami proses sampai pencairan dana.
		Pelaksanaan program ini, berapa kali diadakan dalam setiap periodenya?	Kalau program ini pasti akan dilaksanakan setiap tahunnya.

		<p>Tentunya didalam suatu program terdapat hambatan. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program ini? Dan bagaimana saudara mengatasi hambatan tersebut?</p>	<p>Sejauh ini, hambatan yang kami rasakan itu dari segi data-data yang diberikan pihak desa. Karena pihak desa mau memberikan data-datanya tidak sesuai dengan keadaan nyata di lapangan</p>
		<p>Bagaimana alur pengusulan rumah tidak layak huni?</p>	<p>Tahap dari awalnya itu masyarakat mengisi formulir pengusulan, kemudian kepala deasa melakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan syarat penerima bantuan, selanjutnya pihak dinas akan mengentri ke database dan aplikasi kemudian, Bupati membuat surat permohonan usulan ke Kementerian PUPR dan selanjutnya Kementerian PUPR menerima data usulan dan menetapkan nama-nama calon penerima bantuan.</p>

## Pertanyaan kepada Informan Utama: Kepala Desa dan Sekretaris Desa

No	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Bapak Bongot Silaban selaku Kepala Desa Sitio II dan Bapak Herbin Silaban selaku Sekretaris Desa Sitio II	Menurut informasi yang saudara ketahui, ada berapa keluarga yang mendapat bantuan program bedah rumah di tahun ini?	Untuk tahun ini, masyarakat yang mendapatkan program ini sebanyak 6 Kepala Keluarga
		Apakah ada masyarakat miskin yang dimana rumah mereka sudah layak untuk dibedah, namun belum terdaftar dalam masyarakat penerima program bedah rumah tersebut? Apa penyebabnya?	Tentu saja ada. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa juga karena kami hanya mengusulkan data-data masyarakat yang kami survei. Namun terkait dengan nama-nama yang mendapatkan program ini hanya dari pihak kementerian. Kementerian nanti akan memilih masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini dari data-data yang telah disampaikan.
		Berapa jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan program bedah	Jumlah dana yang disalurkan untuk tahun ini sebanyak Rp 15.000.000 untuk

		rumah?	setiap kepala keluarga
		<p>Bagaimana tahapan awal masyarakat sampai tahapan akhirnya dalam pelaksanaan program ini?</p>	<p>Tahapan awalnya, kami mensurvei ke rumah masyarakat dan kemudian akan kami usulkan ke pihak dinas. Selanjutnya, nanti ada pertemuan antara pihak dinas dengan masyarakat penerima bantuan di kantor kepala desa. Kemudian, pengurusan rekening masyarakat penerima bantuan dan dana yang akan disalurkan akan dikirimkan ke rekening masing-masing penerima. Setelah dana dicairkan, maka proses pelaksanaan bedah rumah dapat dilaksanakan.</p>

		<p>Adakah keluhan/protes dari masyarakat terkait program ini?</p>	<p>Keluhan dari masyarakat tentu ada. Seperti rasa cemburu dan mengatakan kenapa keluarga mereka belum mendapatkan bedah rumah ini. Kami hanya bisa mengatakan harap bersabar, karena dipastikan semua warga yang memiliki rumah tidak layak huni akan mendapatkan bantuan ini, namun secara bertahap tidak bisa sekaligus semua.</p>
		<p>Tentunya didalam suatu program terdapat hambatan. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program ini? Dan bagaimana saudara mengatasi hambatan tersebut?</p>	<p>Hambatannya itu dari masyarakatnya dimana mereka sudah ditetapkan sebagai penerima porigram bedah rumah ini, namun disaat pelaksanaan pembangunan rumah, ada masyarakat yang ,menolak untuk</p>

			rumahnya dibedah dikarenakan mereka tidak mampu untuk berswadaya.
--	--	--	---



Pertanyaan kepada Informan Tambahan: Masyarakat Penerima Bantuan Program

Bedah Rumah

No	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Bapak Lasmalum Sihite, Bapak Selamat Sihite, Bapak Marune Hutasoit, Bapak Managam Silaban selaku masyarakat penerima program bedah rumah	Bagaimana perasaan saudara setelah mengetahui bahwa keluarga ini ditetapkan sebagai keluarga yang berhak mendapatkan bantuan program ini?	Perasaan kami tentunya sangat bahagia dikarenakan kami bisa memiliki kesempatan untuk merenovasi rumah kami menjadi lebih bagus dari rumah kami sebelumnya.
		Bagaimana pendapat saudara terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah terkait dengan program bedah rumah ini?	Kebijakan yang mereka terapkan menurut kami sudah baik. Karena mereka bersedia msngurus dan membantu kami dalam pengurusan berkas-berkas yang akan kami serahkan. Penyampaian informasi dari pihak mereka ke kami juga sudah baik sehingga memudahkan kami dalam mendapatkan informasi selanjutnya terkait pelaksanaan bedah rumah ini.
		Apakah saudara yakin kalau kebijakan program bedah rumah ini dapat meningkatkan kesejahteraan	Dari pihak kami, tentu saja yakin. Karena dengan adanya

		masyarakat miskin?	program ini kami akan melanjutkan kehidupan kami di dalam rumah yang sudah nyaman dan bersih, sehingga kami bisa jauh dari serangan penyakit.
		Jika pelaksanaan program ini telah selesai dilaksanakan, apakah kualitas kehidupan saudara dapat dinyatakan semakin baik dari kehidupan sebelumnya?	Setelah selesai pelaksanaan program ini, kami bisa pastikan bahwa kehidupan kami selanjutnya akan lebih baik dari kehidupan selanjutnya.

## Data Informan Penelitian

### 1. Informan Kunci

Nama : Else Ambarita, ST

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 42 Tahun

Jabatan : Jabfung Teknik Tata Bangunan

### 2. Informan Utama

a. Nama : Bongot Silaban

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 52 Tahun

Jabatan : Kepala Desa Sitio II

b. Nama : Herbin Silaban

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 50 Tahun

Jabatan : Sekretaris Desa Sitio II

### 3. Informan Tambahan

a. Nama : Lasmalum Sihite

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 36 Tahun

Pekerjaan : Petani

b. Nama : Selamat Sihite

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 55 Tahun

Pekerjaan : Petani

c. Nama : Marune Hutasoit

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 50 Tahun

Pekerjaan : Petani

d. Nama : Managam Silaban

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 45 Tahun

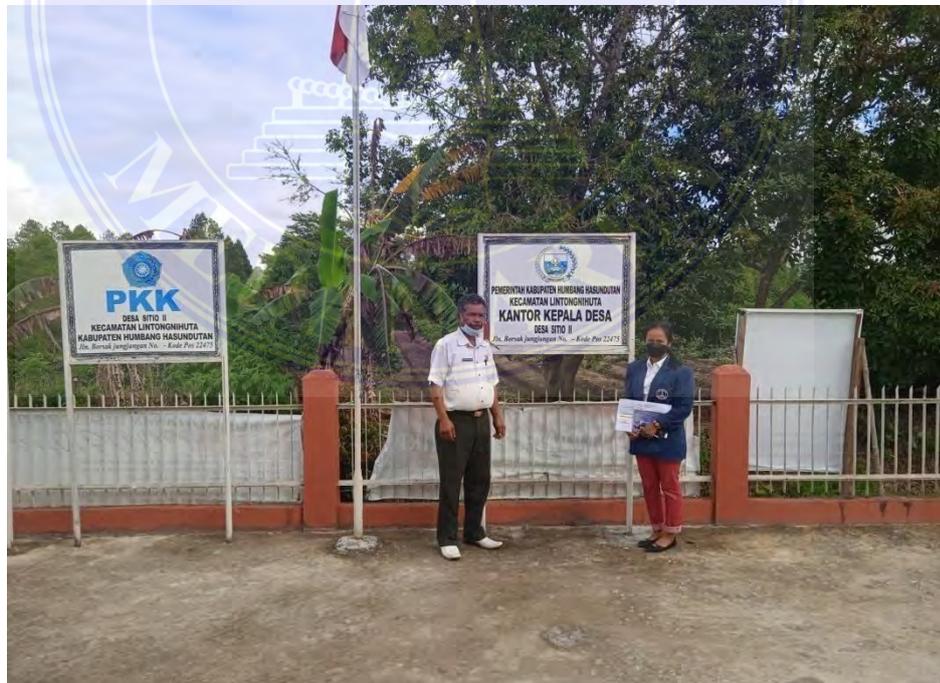
Pekerjaan : Petani



## LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 1. Foto Kantor Kepala Desa Sitio II  
(Sumber: Dokumen Pribadi, Rabu 13 April 2022)



Gambar 2. Foto bersama Kepala Desa Sitio II di depan Kantor Kepala Desa  
(Sumber: Dokumen Pribadi, Rabu 9 Maret 2022)



Gambar 3. Informan Utama  
Bapak Bongot Silaban selaku Kepala Desa Sitio II  
(Sumber: Dokumen Pribadi, Rabu 9 Maret 2022)



Gambar 4. Informan Utama  
Bapak Herbin Silaban selaku Sekretaris Desa Sitio II  
(Sumber: Dokumen Pribadi, Rabu 9 Maret 2022)



Gambar 5. Informan Kunci  
Ibu Else Ambarita, ST selaku Jabfung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan  
(Sumber: Dokumen Pribadi, Jumat 11 Maret 2022)



Gambar 6. Informan Tambahan  
Istri dari Bapak Selamat Sihite selaku masyarakat penerima bantuan program  
bedah rumah  
(Sumber: Dokumen Pribadi, 14 Maret 2022)



Gambar 7. Informan Tambahan  
Istri dari Bapak Lasmalum Sihite selaku masyarakat penerima bantuan  
program bedah rumah  
(Sumber: Dokumen Pribadi, Senin 14 Maret 2022)



Gambar 8. Rumah Bapak Lasmalum Sihite setelah dibedah  
(Sumber: Dokumen Pribadi, Selasa 19 April 2022)



Gambar 9. Rumah Bapak Selamat Sihite  
(Sumber: Dokumen Pribadi, Selasa 19 April 2022)

